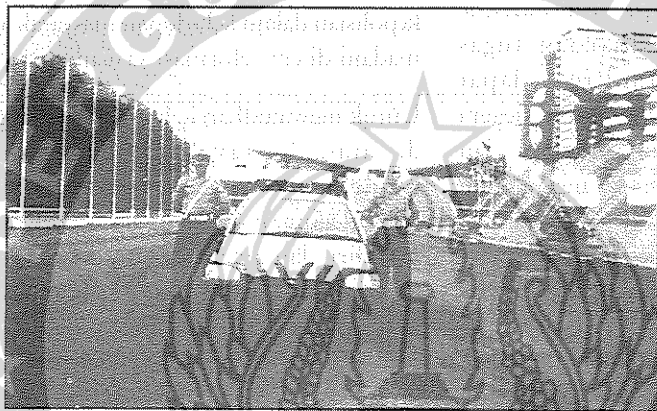


SETELAH KELUAR DARI ABRI APAKAH POLRI LEBIH MANDIRI ???

Oleh : Anton Tabah
(Pengamat Kamtibmas)



Apakah setelah Polri keluar dari ABRI otomatis kinerja Polri menjadi lebih baik? Tidak otomatis. Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, menyangkut hal-hal yang cukup prinsipil seperti SDM personil, sistem pendidikan, anggaran, sarana peralatan dan kesejahteraan Polri yang semuanya standarnya telah dirumuskan PBB. Begitu spesifikkah masalah polisi sehingga SDM, ratio personil dan kesejahteraan polisi ditentukan standar minimumnya oleh PBB?

Kini saat yang tepat untuk mengangkat kembali kajian masalah Polri tidak satu wadah dengan TNI terutama dalam rangka memenuhi standar PBB tersebut guna meningkatkan kinerjanya yang lemah selama masih satu wadah dengan TNI? Namun demikian ada sepotong pengalaman cukup menarik diangkat dalam mengawali tulisan ini.

Pastur asal Jerman yang hampir setengah abad jadi WNI, Frans Magnis Suseno merentang pengalamannya tentang kinerja Polri. Dari pengalaman panjangnya belum sekalipun ia dikecewakan oleh Polri. Bahkan terkesan cara kerja Polri cekatan, tanggap sebagai pelayan masyarakat. Berbeda pengalamannya di negara lain, menurutnya, polisi sering

mengecewakan. Tentu saja pengalaman seorang Frans ini belum memenuhi syarat survey sebuah penelitian memerlukan variabel yang rumit. Namun, setidaknya dapat dijadikan acuan analisis.

Pengalaman Frans ini pasti juga banyak dirasakan orang lain, tetapi orang yang dipuaskan oleh kerja polisi biasanya tak pernah mempublikasikan sedang kekecewaannya dipublikasikan. Sebab itu Romo Magnis menyarankan agar tulisan tentang Polri diperbanyak oleh polisi sendiri dan disosialisasikan secara transparan, guna mengubah sikap apriori masyarakat menjadi kooperatif, antipati jadi empati. Diskusi meluas sampai ke masalah masyarakat "Sakit" dalam birokrasi yang sakit. Tetapi karena konteks bahasanya polisi maka problema pun terfokus. Kalau polisi sakit di tengah masyarakat sakit siapa yang menyetatkan? Polisi menyetatkan masyarakat atau masyarakat menyetatkan polisi?

Frans Magnis mengemukakan keduanya, polisi dan masyarakat harus saling menyetatkan. Hal itu bukan solusi efisien dan hanya akan bernasib seperti solusi-solusi sebelumnya. "Lingkaran Setan" tak berujung tak bertepi. Ada solusi tegas, jelas, lugas.

Polisilah yang harus menyetatkan masyarakat. Caranya?

Dari "Macan Asia":

Negara-negara yang kini berdisiplin tinggi pada mulanya juga punya pengalaman sama dengan Indonesia. Disiplin masyarakat buruk karena polisinya buruk, tak terkecuali Amerika, Eropa dan Asia. Mereka punya referensi sama. Polisi berperan penting dalam mendisiplinkan masyarakat karena di tangan polisi undang-undang menjadi hukum yang hidup. Sebaliknya tanpa polisi UU menjadi barang mati. Solusi mereka, Polisi harus kuat dan tangguh selangkah didepan masyarakatnya. (Charles Reith). Karena Asia, ada baiknya belajar engan negara-negara Asia yang memiliki tingkat disiplin tinggi. Misalnya, Singapura, Jepang, Taiwan dan Hongkong.

Singapura dua dekade yang silam masih memiliki disiplin yang buruk. Polisinya buruk, penyalahgunaan wewenang merajalela. Hasil survey ternyata disebabkan tingkat kesejahteraan polisi yang rendah termasuk sarannya. Solusinya menaikkan kesejahteraan/gaji polisi lebih tinggi dari gaji pegawai keuangan dan perbankan, dan sarana. Solusi tersebut tepat. Mulai satu dekade silam Singapura sudah menjadi param-

eter disiplin Asia Tenggara. Pengalaman serupa dialami Hongkong. Gaji Polisi dinaikkan dua kali lipat lebih tinggi

ketimbang gaji pegawai keuangan negara tersebut.

Dari rangkaian pengalaman ini

GAJI PEGAWAI KEUANGAN DAN POLISI PANGKAT TERENDAH DALAM MASA KERJA NOL TAHUN

NO	NEGARA	PEG. KEUANGAN	POISI	KET.
1	Hongkong	724	1.323	180 %
2	Jepang	1.670	1.890	112 %
3	Singapura	510	515	101 %
4	Malaysia	567	256	45 %
5	Thailand	253	147	38 %
6	INDONESIA	233	63	27 %

Sumber Data : Asiaweek dan Interpol, Desember 1995

kemudian keluarlah standar PBB terhadap kesejahteraan Polisi, diukur perbandingan gaji pegawai keuangan/perbankan. Kalau lebih tinggi, berarti tingkat kesejahteraan Polisi sudah baik. Jika lebih rendah, berarti sebaliknya. Bagaimana dengan Polri? Ada baiknya rekap perbandingan gaji polisi dan pegawai keuangan diberbagai negara, tidak usah jauh-jauh di beberapa negara di Asia saja seperti dalam tabel dibawah ini :

Terlihat 3 negara urutan atas menjadi macan Asia karena berdisiplin tinggi.

Kesejahteraan Polisi sangat baik, dengan gaji di atas gaji keuangan/perbankan. 3 negara urutan bawah masih dalam kondisi kesejahteraan polisi yang rendah. Malaysia dan Thailand baru 40% dari gaji keuangan dan perbankan. Tetapi yang sangat mencolok justru Indonesia, gaji polisi hanya sekitar 25% dari gaji pegawai keuangan dan perbankan. Tak berlebihan apabila ada prediksi, tingkat kesejahteraan Polri terendah di Asia.

Omdankbaar? :

Tingkat kesejahteraan Polri yang terendah di Asia tidak otomatis menjadi yang terburuk di Asia. Polisi Indonesia dinilai cukup baik. Beberapa waktu yang lalu ketika melaksanakan ibadah Umroh saya sempat keliling Asean selain melihat dari dekat kinerja kepolisian juga minta pendapat beberapa anggota masyarakat Asean tentang Polri. Ternyata mereka kagum dan memuji Polri. Menurut mereka Polisi Indonesia cakap, cekatan dan lebih ramah ketimbang polisi mereka. Dikuatkan oleh pengalamannya ketika berkunjung ke Indonesia selalu dibantu Polri dengan cepat. Rangkaian pengalaman mereka sama dengan Romo Magnis, terekam baik dalam hati mereka.

Apabila oleh masyarakatnya sendiri Polri masih dicemooh, tak memuaskan, adalah adigium umum. Terjadi dimana saja. Masyarakat selalu tak puas dengan polisinya sendiri, mengkrystal dalam opini umum. Di Eropa sering kita dengar ungkapan "omdankbaar". Profesi yang tak kenal mendapatkan ucapan terimakasih, yang ada hanya cacian, umpatan dan cemooh. Semacam ungkapan klasik dari leluhur, "Kalau saya salah tak seorangpun lupa, tetapi kalau saya baik tak seorangpun ingat". Rasanya pas benar, kalau ungkapan

**PROFESI YANG TAK KENAL
MENDAPATKAN UCAPAN TERIMA
KASIH, YANG ADA HANYA CACIAN,
UMPATAN DAN CEMOOH. SEMACAM
UNGKAPAN KLASIK DARI LELUHUR,
"KALAU SAYA SALAH TAK
SEORANGPUN LUPA, TETAPI KALAU
SAYA BAIK TAK SEORANGPUN
INGAT".**

seperti itu diucapkan oleh seorang polisi. Namun adigium ini tidak dijadikan legitimasi untuk nglokro. Polri terus memperbaiki sikap penampilan dan kinerja guna meningkatkan profesionalismenya.

Bukan Polri yang buruk apalagi sakit. Tetapi kesisteman yang mengkondisikan. Lalu muncul kesadaran politik untuk mengedepankan Polri. Sebuah kesadaran yang nyaris terlambat. Lalu diperbaiki. Kalau polisi lemah dicari penyebabnya, mengapa lemah? Lalu dikuatkan. Bukan sistem diubah. Bagaimanapun, Polri memang harus didepan sesuai tuntutan zaman.

Perubahan kesadaran politik macam ini hendaknya dikemas secara transparan kedalam GBHN mendatang dan

seterusnya. Kemauan politik akan menjadi realita apabila peningkatan pembangunan Polri diprioritaskan dalam peta pembangunan nasional. Belajar dari pengalaman dan efisiensi, polisilah yang harus menehatkan masyarakatnya bukan masyarakat menehatkan polisi. Artinya, polisi harus kuat dan sehat terlebih dulu sebelum masyarakatnya. Untuk itu diperlukan komitmen politik yang konsisten.

Komitmen politik harus diartikan lebih makro. Sistem/politik kesamaan dimata hukum, kepastian hukum, harus diapresiasi secara tegas. Faktanya, hukum kita masih mendua. Masih ada perbedaan perlakuan hukum terhadap pejabat negaram, anggota dewan, pegawai negeri dan profesi tertentu. Hukum belum konsisten. Diskriminasi ini akan menyulitkan aplikasi penegakan hukum di Indonesia dan membuat masyarakat tidak sehat menjaral keseluruhan tatanan sosial. Untuk mengubah "tatanan" yang sudah mendarah daging ini memang tidak mudah, perlu kesadaran politik guna menehatkan tatanan tersebut.

Kesadaran politik macam ini tidak terjadi secara otomatis. Internalisasi melalui tulisan, buku, tentang

kepolisian dan pembangunan kamtibmas menjadi kontribusi penting di abad informasi ini. Sayangnya, selain belum banyak buku dan tulisan tentang Polri juga jarang sekali anggota Polri yang mau menulis. Anggota Polri yang mampu analisis dengan baik cukup banyak, tetapi mereka ketakutan dengan sistem pembinaan karier Polri selama ini, menempatkan personil-personil yang bagus analisisnya cuma distaf tidak dipromosikan di lapangan operasional. Inilah yang menghantui para anggota Polri selama ini. Untuk menumbuhkan motivasi semacam ini diperlukan kearifan dari para petinggi Polri.

Setelah Polri tidak satu wadah dengan TNI, apa benar telah memiliki otoritas luas dan menggunakannya untuk memenuhi ratio polisi dan kesejahteraan polisi sesuai standar PBB tersebut. Rasanya belum juga. Rasanya Polri belum bisa berbuat apa-apa. Itu disebabkan Polri baru terpisah dari TNI tetapi masih digondeli di Hankam. Dengan demikian Polri susah untuk benar-benar mandiri selama ada kekuatan tertentu yang intervensi ke tubuh Polri. Polri baru bisa benar-benar mandiri apabila Polri tidak dibawah lembaga atau kekuatan apapun tetapi mandiri bertanggung jawab langsung pada Presiden.

Anton Tabah, Pengamat Kamtibmas